

Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia

Mawar^{1,*}, Lusi Andriyani², Armyn Gultom³, Khofifah Ketiera⁴

^{1,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

² Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email : mawar@umj.ac.id

ABSTRAK

Penyebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan dengan jumlah peningkatan kasus yang sangat tajam setiap harinya. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini ternyata berdampak pada aspek sosial ekonomi yang sangat besar di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial ekonomi kebijakan PPKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor sosial ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Persoalan lain adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin yang secara signifikan membuat jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma meningkat bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Angka perceraian berpotensi meningkat karena timbulnya permasalahan di rumah tangga karena himpitan ekonomi. Angka pengangguran yang semakin melonjak dengan sendiri akan menyebabkan tindakan kriminalitas juga meningkat. Dampak ekonomi dan sosial diatas tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk.

Kata kunci: Dampak, Sosial Ekonomi, Kebijakan, PPKM

ABSTRACT

The spread of the Covid-19 virus that is currently happening is increasingly worrying by seeing the number of cases increasing which is very sharp every day. Therefore, the Government must provide protection to the public in preventing and handling Covid-19 cases in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The steps taken by the government are through the implementation of the policy for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM). However, this policy turned out to have a very large socio-economic impact on the community. This study aims to identify and analyze the socio-economic impact of policies (PPKM) in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study method. Qualitative data analysis. The results of the study show that government policies by implementing the PPKM policy have a very large impact on the economic sector. Restrictions on carrying out activities on a large scale will automatically result in increasingly difficult economic conditions with the cessation of most economic activities. The PPKM policy has also had an impact on the interaction of social relations. Restrictions on activities and interactions between humans have become a social problem because of the boredom and boredom that occurs while following the provisions, one must stay at home. Another problem is the increase in the number of poor people, which significantly increases the number of beggars, street children, the

homeless and the homeless, and it is very possible to increase the number of people with mental disorders. The divorce rate has the potential to increase due to problems in the household due to the economic crush. The increasing unemployment rate will automatically increase the crime rate. The economic and social impacts above are certainly a challenge for the government in evaluating the policies implemented so that people's conditions do not get worse.

Keywords: *Impact, Social Economic, Policy, PPKM*

1. PENDAHULUAN

Penyebaran wabah corona virus (Covid-19) di Indonesia yang semakin ganas memberikan kecemasan kolektif apabila ia menjangkit terlalu lama di Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran virus covid 19 di Indonesia yang semakin meningkat, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dibuat untuk membatasi secara besar-besaran aktivitas warga selama pandemi virus corona agar tingkat penularan bisa berkurang. Aturan ini juga diklaim pemerintah sebagai jalan tengah dari desakan berbagai pihak yang ingin Indonesia --setidaknya ibu kota-- untuk lockdown (kompas.com, 2020). Indonesia tidak menggunakan istilah (*Lockdown*) namun menggunakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020, arti dari Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid 19.

Perkembangan kasus baru dan meningkatnya kasus kematian Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencermati pelaksanaan PPKM. Hingga saat ini, sejumlah wilayah di Indonesia sudah menerapkan kebijakan PPKM. DKI Jakarta yang pertama kali menerapkan

PPKM, namun setiap harinya masih menghadapi pertumbuhan kasus baru dan cenderung meningkat tajam

Kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM jelas memberikan dampak yang besar diberbagai aspek kehidupan. Lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung (Agustino, 2020). Dampak yang paling jelas terlihat adalah aspek ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian aktivitas ekonomi tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi covid-19 ini segera berakhir.

Dampak pandemi covid -19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Persebaran covid-19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan PPKM, blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan pun terhambat. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan PPKM oleh pemerintah.

Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahaan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengeksport hasil produksi ke berbagai negara lain. (kompas.com, 2020)

Dampak ekonomi kebijakan PPKM tidak berhenti di situ, selanjutnya, SMERU Research Institute (2020) merilis hasil simulasi dampak pandemi covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berbeda dengan proyeksi ideal pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5 persen, kajian tersebut menerangkan bahwa angka itu akan turun dari 4,2 hingga 1 persen karena dampak penyebaran covid-19. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya terkoreksi menjadi 4,2 persen, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,22 persen hingga 9,71 persen. Artinya, jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1 persen, tingkat kemiskinan diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37 persen. Jumlah orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta.

Selain dampak ekonomi akibat adanya kebijakan PPKM, yang mengalami perubahan yang cukup signifikan adalah aspek sosial, dimana kondisi masyarakat yang belum siap beradaptasi tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Akan tetapi, dalam konteks kebijakan PPKM, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru? atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi

ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru?

Harus diakui bahwa dampak pandemi covid-19 apalagi dengan pemberlakuan kebijakan PPKM di Indonesia telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana. Sebab pandemi Covid-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru.

Melihat situasi dan kondisi yang diatas, dimana pandemi covid-19 tampak telah jauh berkembang dari suatu krisis kesehatan yang perlahan bereskalasi menjadi krisis sosial-ekonomi, maka sangat penting kajian mengenai dampak sosial dan ekonomi penerapan kebijakan PPKM di Indonesia. Situasi tersebut tidak luput dari kajian kebijakan publik karena menyangkut suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (*do or not to do*) seperti menurut Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho (2003) menjelaskan bahwasanya Kebijakan publik sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do.”*, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya

yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Selanjutnya Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2017) menjelaskan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan ". Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis dampak sosial ekonomi dari penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dimana dari hasil penelitian ini ini akan menjadi rekomendasi strategi agar implementasi kebijakan PPKM berjalan efektif dan dapat menjadi suatu gagasan untuk mengatasi dampak negatif pada aspek sosial ekonomi dari kebijakan PPKM di Indonesia. Landasan teori yang digunakan dalam analisis kebijakan adalah *deliberative policy analysis* yang dapat digunakan untuk membahas peran argumen, retorik, dan narasi dalam proses analisis kebijakan (Fischer, 2007). Marsh & Smith (2000) juga mengembangkan dialectical model yang bertujuan untuk menjelaskan secara lebih lanjut mengenai peran aktor, relasi aktor, dan kepentingannya dalam analisis kebijakan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hal ini dilakukan

karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif. Wabah virus covid 19 dan juga implementasi pelaksanaan kebijakan PPKM di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Teknik analisis data secara kualitatif (Creswell, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Ekonomi Kebijakan PPKM

Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menanggulangi semakin meluasnya penyebaran virus covid 19 ternyata berdampak sangat luas. Upaya mengurangi pergerakan manusia untuk mencegah kontak sehingga diharapkan dapat menekan penyebaran virus penyebab Covid-19 melalui *Social Distancing* dan *Physical Distancing* realitasnya membawa dampak yang besar dalam aspek sosial dan ekonomi.

Bidang yang sangat jelas terlihat terkena imbasnya dari penerapan kebijakan PPKM ini adalah bidang ekonomi. Bahkan bisa dikatakan bahwa lebih separuh aktivitas di bidang ekonomi terhenti karena pandemi Covid-19 ini. Dunia ekonomi dan bisnis saat ini benar-benar menghadapi masa-masa sulit dimana perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa bangkit kembali. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ternyata kurang efektif karena masyarakat merasa belum

sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah belum dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah untuk mampu memenuhi kebutuhannya (Arista, 2020). Fhatoni (2020) mengemukakan bahwa semakin lama pemberlakuan kebijakan PPKM maka pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan semakin menurun.

Persebaran covid 19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan kebijakan PPKM, blokade jalan oleh aparat keamanan dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan pun terhambat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal.[2] Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan PSBB oleh pemerintah setempat. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahaan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengeksport hasil produksi ke berbagai negara lain.(kompas.com, 2020)

Lembaga keuangan dunia *International Monetary Fund (IMF)* menyakini bahwa krisis kesehatan yang dialami oleh semua negara di dunia karena pandemi Covid-19 akan berdampak sangat parah terhadap kegiatan ekonomi (IMF, 2020). Ekonomi global mengalami kontraksi tajam sampai -3% pada tahun 2020. Kondisi ini diyakini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kejadian krisis

keuangan tahun 2008 sampai 2009. Negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam bahkan diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai -6% (IMF, 2020). Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan situasi ketidakpastian sangat tajam hampir pada semua aspek seperti dampak virus, ketersediaan media testing, kemampuan sistem perawatan kesehatan, kebutuhan vaksin. Selain itu juga ketidakpastian terhadap dampak ekonomi jangka pendek, kecepatan pemulihan saat pandemi mereda, dampaknya pada kelangsungan hidup bisnis dan sebagainya (Baker et al., 2020).

OECD dalam publikasi tanggal 2 Maret 2020 tentang hasil penilaiannya terhadap risiko ekonomi yang timbul karena wabah COVID-19 memprediksi akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,5 point dari estimasi awal 2,9% menjadi 2,4% atau bahkan bisa turun hampir separuhnya menjadi 1,5% jika wabah Covid-19 secara global terus berlangsung berkepanjangan (OECD *Interim Economic Assessment*, 2020). Sementara prediksi dari Asian Development Bank (ADB) dalam publikasinya tanggal 6 Maret 2020 memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia sebesar 2,2%, bahkan negara-negara Asia Tenggara (termasuk Timor Leste) hanya 1,0%. Angka ini turun signifikan dibanding dengan prakiraan yang dibuat oleh ADB pada Desember 2019 mengindikasikan sebesar besar dampak wabah Covid-19 terhadap sektor ekonomi negara-negara di Asia (Asian Development Bank, 2020). Sektor-sektor utama dalam ekonomi di negara-negara ASEAN telah mengalami dampak langsung akibat pandemi Covid-19. Terutama transportasi dan pariwisata, penjualan barang secara ritel dan sektor pelayanan jasa lainnya. Selain itu juga perlambatan aktivitas bisnis karenanya rantai pasokan yang terganggu, ancaman PHK dan terganggunya mata pencaharian (ASEAN, 2020).

Tekanan pelemahan ekonomi yang dialami negara tercermin dari rendahnya penerimaan pajak. Data Kementerian Keuangan menyebutkan hingga April 2020 pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh

negatif 3,1 % (yoy) atau sebesar Rp 376.67 triliun (hanya 30 % dari target APBN). Sektor-sektor utama yang dominan menyumbang penerimaan pajak seperti perdagangan, konstruksi dan real estate, pertambangan, serta transportasi dan perhubungan mengalami kontraksi. Meskipun memang beberapa sektor lainnya masih tumbuh seperti jasa keuangan dan asuransi karena masih beroperasi selama pandemi Covid-19 .

Di sisi lain, adanya wabah pandemi Covid-19 telah memicu peningkatan realisasi belanja negara khususnya ditujukan dalam penanganan Covid-19. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga April 2020 realisasi belanja telah mencapai 23,87 % dari pagu APBN atau senilai Rp 623,98 triliun. Jumlah realisasi belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat meningkat sebesar 3,4 % (yoy) atau Rp 382,53 triliun, kemudian untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh negatif 8,0 % (yoy) atau senilai Rp 241,45 triliun (Kemenkeu, 2020)

Porsi terbesar penggunaan realisasi belanja pemerintah pusat adalah untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 61,4 triliun dan belanja modal yang mencapai Rp 20,7 triliun. Peningkatan belanja bansos sebesar 13,7 % (yoy) diperuntukkan kegiatan pendukung *Sosial Safety Net* (SSN) atau Jaring Pengaman Sosial dalam menghadapi wabah pandemi covid-19.

Perlambatan berbagai aktivitas ekonomi, dunia usaha, perdagangan dan berbagai sektor penggerak ekonomi real telah menyebabkan potensi penurunan PDRB Indonesia pada tahun 2020 sehingga otomatis terjadi penurunan pendapat per kapita penduduk Indonesia. Dampak langsungnya adalah penurunan daya beli dan peningkatan jumlah penduduk yang berada dibawah standar garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi perputaran uang di pasar (*market*) sehingga semakin menekan perlambatan aktivitas perdagangan yang akhirnya berdampak juga secara sistemik kepada sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang dimaksud adalah :

Sektor Industri, Dunia Usaha dan Perdagangan

Dari sisi sektor industri dan dunia usaha termasuk perdagangan, persoalan besar yang dialami oleh negara-negara ASEAN adalah karena faktor hubungan dagang dengan Cina, negara tempat berawalnya wabah Covid-19. Data menunjukkan bahwa Cina merupakan mitra dagang dan investor eksternal terbesar untuk negara-negara kawasan ASEAN. Tahun 2018 Cina menguasai sekitar 17,1% dari total transaksi perdagangan ASEAN dan memberi 5kontribusi sebesar 6,5% dari total *Foreign Direct Investment (FDI)* (ASEAN, 2020).

Begitu jua terkait *supply chain* negara-negara ASEAN sangat bergantung pada sektor industri manufaktur di China. Dunia industri negara-negara ASEAN mengalami goncangan awal terkait *supply chain* karena penutupan pusat industri utama untuk mesin dan elektronik di Propinsi Hubei karena kebijakan lockdown pemerintah setempat. Kekosongan suku cadang mengakibatkan aktivitas di sepanjang rantai pasokan akan menurunkan produksinya. Pabrik-pabrik terancam terhenti beroperasi sehingga akan berdampak sistemik termasuk potensi penambahan pengangguran karena PHK (ASEAN, 2020).

Sehingga ketika negara China mengalami perlambatan ekonomi karena terdampak paling awal dari Covid-19, maka akan sangat berpengaruh terhadap negara-negara ASEAN selain juga mengalami dampak langsung dari wabah tersebut. Perlambatan transaksi perdagangan dunia dalam perkiraan WTO adalah antara 13% dan 32% pada tahun 2020, yang bahkan melebihi penurunan yang disebabkan oleh Krisis Keuangan Global (WTO, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak yang akan dirasakan pada negara-negara ASEAN diprediksi akan sangat sistemik, luas dan mendalam meskipun akan bervariasi di setiap negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 mengharuskan seluruh dunia industri, pelaku usaha dan pabrik-pabrik untuk tutup dan dilarang beroperasi kecuali industri yang bersifat strategis. Hal

tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada Pasal 13 Ayat (1) huruf a bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja.

Penutupan pabrik-pabrik, dunia industri dan pelaku usaha secara nyata akan menyebabkan penurunan aktivitas dan kapasitas produksi yang secara ekonomis pasti berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Hal ini terjadi pada semua tingkat dunia usaha dari mulai perusahaan multi nasional besar, perusahaan menengah sampai pada level kecil dan mikro atau pekerja informal.

Di sisi lain beban operasional secara *fixed cost* perusahaan tetap seperti membayar gaji pegawai, membayar iuran jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja, membayar pajak badan usaha dan pajak pribadi pegawai, pembayaran listrik dan sebagainya karena perusahaan dilarang tidak membayar upah karyawan apalagi memberhentikan pegawai selama PPKM berlangsung. Dunia usaha mengalami pukulan langsung dan telak terhadap hal ini.

Wabah Covid-19 bukan hanya berdampak pada sulit aktivitas produksi, akan tetapi juga berakibat pada kemampuan mempekerjakan karyawan yang semakin melemah sehingga tanpa mitigasi sektor ekonomi yang tepat maka skenario terparah pada dunia usaha sangat mungkin terjadi. Para pelaku dunia usaha memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk mempertahankan usaha dan menggaji karyawannya sehingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat sulit untuk dielakkan. Ancaman lonjakan angka pengangguran diperkirakan meningkat tajam.

Secara sistemik akibat aktivitas produksi yang menurun mengakibatkan volume perdagangan menurun yang pada akhirnya akan menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Demikian juga para pelaku usaha mikro dan sektor informal seperti industri kerajinan rumahan (*home industry*) dan usaha

kuliner mengalami dampak tragis kehilangan aktivitas produksi karena harus dihentikan dan ditutup. Para pekerja informal yang merupakan kelompok masyarakat rawan secara ekonomis akan kehilangan pendapatan dan akhirnya jatuh menjadi kelompok masyarakat miskin sehingga tidak mengherankan jika prediksi jumlah penduduk miskin akan berlipat ganda.

Sektor Pariwisata dan Transportasi

Pandemi covid-19 telah menimbulkan permasalahan secara langsung dalam aktivitas ekonomi khususnya di sektor pariwisata yang sangat lesu, transportasi udara yang dibatasi sampai pada menurunnya kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha. Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara, karantina masyarakat, *social distancing* dan *physical distancing*, penutupan pusat-pusat bisnis serta pembatasan mobilisasi (ASEAN, 2020).

Begitu pula pada sektor pariwisata yang selama ini berdasarkan data, negara-negara Asia Timur seperti China, Hongkong, Jepang dan Korea merupakan penyumbang wisatawan terbanyak ke negara-negara ASEAN. Sehingga ketika terjadi pembatasan atau bahkan penutupan sementara koneksi penerbangan maka sektor yang paling terpukul adalah transportasi dan pariwisata.

Penghentian operasionalisasi dan penutupan tempat-tempat pariwisata karena kebijakan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* serta adanya penutupan akses transportasi membuat kunjungan ke fasilitas wisata anjlok drastis bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Pukulan keras terhadap sektor pariwisata juga berimbas pada sektor pendukungnya seperti Dampak langsung seperti perhotelan, wisata kuliner, kerajinan dan ekonomi kreatif serta para pedagang kecil sebagai pekerja informal di sekitar daerah wisata. Dunia perhotelan benar-benar ambruk dengan kondisi wabah Covid-19 ini. Tingkat hunian kamar yang hampir nol sedangkan biaya *fixed cost* yang tetap tinggi telah membuat para pelaku usaha perhotelan menekan pengeluaran melalui perampingan jumlah karyawan sehingga

akhirnya semakin menambah jumlah pengangguran karena mengalami PHK. Para pedagang kecil, usaha mikro dan pekerja informal pendukung pariwisata yang berada di sekitar lokasi wisata sama sekali kehilangan pendapatan dan berhenti total. Padahal klaster masyarakat ini sangat rentan jatuh dalam kelompok masyarakat miskin.

Salah satu contoh kecil dari sekian banyaknya permasalahan di sektor pariwisata dan perhotelan adalah kondisi pariwisata di pulau Bali. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyatakan bahwa perekonomian di Bali saat wabah Covid-19 menjadi yang terparah dalam sejarah karena tingkat hunian kamar hotel di Bali sampai pada titik yang sangat memprihatinkan yaitu zero atau nol. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 jauh lebih parah jika dibandingkan dengan peristiwa Bom Bali dan letusan Gunung Agung. Tingkat hunian hotel setelah kejadian bom Bali masih berada pada sekitar 20 %, sedangkan setelah erupsi Gunung Agung bahkan masih mampu mencapai 60 % karena radius berbahaya hanya pada jarak 12 KM. Tapi Covid-19 telah membuat tingkat hunian hotel di Bali adalah zero persen atau benar-benar kosong tidak ada tamu yang menginap. Jumlah hotel yang tutup sudah mencapai 96 % dan bisa menjadi 100 % tutup semua karena wisatawan mancanegara akan dipanggil pulang ke negaranya masing-masing. Sektor industri pariwisata Bali kehilangan potensi pendapatan yang mencapai miliaran rupiah setiap harinya karena kunjungan wisatawan asing mencapai 16 ribu sampai 17 ribu orang setiap hari dengan rata-rata pengeluaran belanja per orang mencapai Rp 20 juta. Perekonomian di Bali benar-benar porak-poranda karena wabah Covid-19 dan tentu terjadi juga pada daerah-daerah yang sejenis dimana sektor pariwisata menjadi andalan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat (Sugiari, 2020).

Secara nasional di Indonesia berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pusat sampai dengan awal April 2020 terdapat 1.266 hotel tutup dan 150 ribuan pegawainya terpaksa dirumahkan. Data ini secara riil

bisa jauh lebih banyak karena data tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke PHRI Pusat (Kompas, 2020).

Kondisi sama terjadi pada sektor transportasi yang bahkan mengalami dampak paling awal dengan adanya pembatasan akses kunjungan sejak wabah pandemi Covid-19 mulai terjangkau di Wuhan. Penghentian akses transportasi baik internasional (antar negara) maupun domestik (antar wilayah) secara nyata berdampak terhadap operasional perusahaan penyedia moda transportasi udara, laut dan darat. Terjadinya restriksi kunjungan dan semakin ketatnya pemeriksaan di pintu masuk menyebabkan banyak calon pendatang yang membatalkan kunjungannya sehingga tidak hanya berdampak pada tingkat hunian hotel yang menurun drastis, namun juga penurunan jumlah penumpang moda transportasi.

Industri penerbangan mengalami *potential loss* atau kehilangan pendapatan rata-rata hingga mencapai 70 persen. Begitupula dengan PT. KAI yang average okupasinya hanya tinggal 10 % sampai 16 % sejak mewabahnya Covid-19. Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) mencatat potensi kerugian dari sektor transportasi darat mencapai 11 triliun lebih. Beberapa perusahaan transportasi melakukan alih fungsi dari angkutan penumpang menjadi angkutan barang atau kargo sebagai langkah penyelamatan dari kerugian yang semakin parah (Kompas, 2020a).

Beberapa perusahaan penerbangan swasta terpaksa merumahkan ratusan karyawannya karena pendapatan perusahaan hanya mengandalkan ekspedisi cargo saja sejak pelarangan penerbangan sipil diberlakukan. Lesunya dunia pariwisata dan transportasi pada akhirnya berkontribusi terhadap lemahnya penerimaan negara dari sektor pajak dan juga terhadap penurunan devisa negara.

Dampak Sosial Kebijakan PPKM

Kebijakan PPKM membawa dampak yang sangat besar dalam aspek sosial masyarakat Indonesia. Sebuah riset dilakukan oleh RB *Consulting* melalui survei secara online dengan melibatkan *Snapcart* pada rentang waktu 17 Maret sampai 28 Maret 2020, kegiatan ini

menyasar sebanyak 2020 responden yang berusia 15 sampai 50 tahun pada pria dan wanita serta berdomisili di 8 kota besar di Indonesia. Hasilnya cukup mencengangkan dimana sebanyak 58 % responden mengalami gangguan dalam kehidupan sosialnya. Sebagian besar merasa terganggu karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak (*physical distancing*) dan di rumah saja menjadi faktor penyebab utama gangguan dalam kehidupan sosial para responden (CNN, 2020). Kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada hari raya untuk bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga dan handai taulan tentu menjadi tekanan sosial yang sangat berat karena benar-benar merubah tradisi kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial antar masyarakat seperti adanya perasaan kekhawatiran, kecurigaan dan menurunnya kepercayaan kepada orang di sekitar apalagi terhadap orang yang baru dikenal di lingkungan tersebut. Ada sikap paranoid terhadap orang lain yang baru dikenal karena kekhawatiran orang tersebut membawa virus sehingga bisa menularkan dan sebagainya. Anjuran untuk tidak berjabat tangan juga telah mempengaruhi terhadap aspek sosial dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Bagaimana adab yang dijunjung tinggi seseorang yang lebih muda menolak bersalaman atau jabat tangan kepada yang lebih tua. Pemakaian masker juga telah menggeser nilai-nilai sosial di masyarakat terkait interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar.

Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Persoalan lain adalah penambahan jumlah penduduk miskin akan meningkatkan jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Angka perceraian berpotensi meningkat karena timbulnya permasalahan di rumah tangga karena himpitan ekonomi setelah suami terkena PHK sehingga dianggap

tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi sehari-hari.

Larangan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak baik *indoor* ataupun *outdoor* telah berdampak secara sosial khususnya pada acara-acara seremonial resepsi pernikahan dan acar serupa. Ada kekhawatiran para calon pengantin yang telah menetapkan waktu dan tanggal resepsi namun terancam diundur atau dibatalkan karena ada kebijakan *social and physical distancing*. Hal-hal seperti ini sangat mungkin menimbulkan tekanan psikososial di masyarakat. Ditambah lagi dengan masyarakat yang sudah haus dengan hiburan dan wisata yang tidak bisa karena tidak adanya akses transportasi dan sarana wisata yang ditutup. Keinginan refreshing dengan menonton acara-acara pertunjukan seperti konser musik, theater dan film di bioskop harus dikubur dalam-dalam selama masa wabah Covid-19. Situasi dan kondisi dimana aktivitas serba dibatasi tentu akan memantik tekanan psikis dan masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat.

Pembatasan pergerakan manusia guna mengurangi resiko kontak juga telah menyebabkan aktivitas-aktivitas rutin keagamaan yang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah juga dilakukan pembatasan bahkan penutupan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bagi masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat berjamaah lima waktu, sholat Jum'at, sholat tarawih bahkan sampai Sholat Idul Fitri dilakukan di rumah. Tempat-tempat ibadah agama lain juga dilakukan pembatasan aktivitas ritualnya. Gereja-gereja dihimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan misa kebaktian dan menyelenggarakan kegiatan peribadatan rutin lainnya. Pada intinya adalah pembatasan interaksi antar manusia semuanya harus dilakukan termasuk juga polemik tentang pelarangan mudik dan atau pulang kampung dalam momentum hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan sebagainya telah membawa persoalan dari aspek keagamaan dan aspek sosial di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan dampak politik dari Covid-19 secara substansial adalah potensi munculnya krisis politik sebagai lanjutan dari gangguan keamanan yang tidak diselesaikan secara menyeluruh atau komprehensif dan berkeadilan. Sejarah di Indonesia memberi pelajaran bagaimana peran elite-elite politik dengan latar belakang organisasi masyarakat (ormas) ataupun sebagai lembaga resmi dari partai politik telah berperan sebagai provokator dan aktor dalam berbagai pergolakan sosial politik di tanah air. Rasa ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan Covid-19 bisa menjadi bibit-bibit ketidakpuasan, kecemburuan sosial, perasaan diskriminasi di mata hukum ditambah dengan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin meluas akan sangat mudah ditunggangi oleh agenda-agenda politik.

Sedangkan dari segi keamanan, sangat jelas bahwa Covid-19 akan berdampak terhadap situasi keamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini salah satunya terkait dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran semakin melonjak, kesulitan dan himpitan ekonomi akan memicu masalah-masalah sosial di masyarakat termasuk masalah keamanan karena meningkatnya kriminalitas. Berbagai motif tindak kriminalitas yang terjadi dari tidak punya uang untuk makan sampai motif kejahatan dengan kekerasan akan meningkat tajam pada masa pandemi Covid-19. Dampak ekonomi dan sosial diatas tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk. Meningkatnya pandemi mempengaruhi interaksi sosial dan kegiatan ekonomi melalui kebijakan jarak sosial yang diberlakukan yang memiliki tingkat keketatan yang berbeda ditiap-tiap wilayah. Kebijakan sosial ternyata dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara (Peterson, 2020)

Disisi lain kondisi pandemi covid 19 sebenarnya membuka peluang-peluang ekonomi baru bagi pengembangan usaha-

usaha mikro, apabila peluang tersebut dimanfaatkan dibarengi dengan pendampingan dari pemerintah akan sangat prospek untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Temuan yang dilakukan oleh Tanoh, David dan Eric (2020) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ghana bahwa pandemi covid 19 dapat menjadi prospek dan peluang dengan berinvestasi secara besar-besaran di sektor kesehatan, pemerintah memberikan dukungan untuk UMKM sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menanggulangi semakin meluasnya penyebaran virus covid 19 ternyata berdampak sangat luas. Upaya mengurangi pergerakan manusia untuk mencegah kontak melalui *social distancing* dan *physical distancing* realitasnya membawa dampak yang besar dalam aspek sosial dan ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi .Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Persoalan lain adalah penambahan jumlah penduduk miskin secara signifikan juga dapat meningkatkan jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Angka perceraian berpotensi meningkat karena timbulnya permasalahan di rumah tangga karena himpitan ekonomi. Angka pengangguran yang semakin melonjak dengan sendiri akan menyebabkan tindakan kriminalitas juga meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMJ dan Tim.
3. Dekan FISIP UMJ.
4. Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UMJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Fischer, F. (2007). *Deliberative Policy Analysis as Parctical Reason : Integrating Emperical and Normative Arguments*. Dalam Frank Fisher, Gerrald J. Miller and Mara S. Sidney. *Handbook of Public Analysis : Theory, Practical and Methods*, 223-236. Boca Raton, FL : CRC Press
- Agustinus, Leo. (2017). *Analisis Kebijakan penanganan wabah covid 19 : Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, Vo. 16 No.1
- Fhatoni, Ahmad. (2020). *Dampak covid 19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya*. Oleh Ahmad Fhatoni. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah Vo.3 No.1.
- Mars, D., & Smith, M. (2000). *Undestanding Policy Network: Toward a Dialectical Approach*, *Political Studies*, 48(1), 4-21.
- Ristyawati, Aprista. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Masa Pandemi Covid 19 Oleh Pemerintah sesuai Amanat UUD 1945*. *Administrative Law and Governance Journal*, Vo.3 No.2.
- Tanoh Aduhene, David.,& Osei Assibery, Eric. (2020). *Socio-economic impact of COVID-19 on Ghana's economy: challenges and prospects*. *International Journal of Social Economics*. DOI 10.1108/IJSE-08-2020-0582.
- Zili. Peterson. (2020). *Covid 19 in Africa:socio-economic impact, policy response and opportunities*. *International Journal of Sociology and Social Policy*. DOI 10.1108/IJSSP-05-2020-0171.
- ASEAN. 2020. The economic impact of the COVID-19 outbreak on developing Asia. *ASEAN Integration Monitoring Directorate (AIMD) and Community Relations Division (CRD)*, 9(128), 1–14.<https://doi.org/10.22617/BRF200096>
- Baker, Bloom, & Davis. (2020). *COVID-induced economic uncertainty and its consequences | VOX, CEPR Policy Portal*. 1–8.
- IMF. 2020. *FISCAL MONITOR : Policies to Support People During teh COVID-19 Pandemic*. International Monetary Fund (IMF).
- Kompas.2020. *Dampak Corona, Bisnis Transportasi Merugi dan Beralih Fungsi*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/article/78453/dampak-corona-bisnis-transportasi-merugi-dan-beralih-fungsi>.
- Sugiari, L. P. (2020). *Dampak Covid-19 bagi Pariwisata Jauh Lebih Parah dari Bom Bali*. Bali Bisnis. <https://bali.bisnis.com/read/20200410/538/1225373/dampak-covid-19-bagi-pariwisata-jauh-lebih-parah-dari-bom-bali>

